



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DONI YANSEN**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **964109**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.270.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 388.5 m2/200 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 673 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 25122 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 25122 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 25122 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 42420 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 17508 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **15.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 111.258

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.285.111.258

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.285.111.258

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.